



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAHONO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 414052

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 479.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 156.500.000
2. Tanah Seluas 3610 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
3. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 74.500.000
4. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
6. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 38.500.000
7. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 132.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI



	Rp. 11.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	9.200.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	194.954.404
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	815.654.404
III. HUTANG		Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	815.654.404

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.